



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Juni 2021

Halaman: 1

Hilangkan Kesan 'Nuthuk' Wisatawan
Yogya Kecolongan,
Perlu Tindakan Konkret

YOGYA (KR) - Pariwisata DIY saat ini sedang menjadi sorotan, setelah munculnya wisatawan yang menjadi korban mahalnya harga warung lesehan di salah satu kawasan Malioboro. Meski pemilik warung sudah meminta maaf, namun perlu tindakan konkret dari pemerintah terkait agar persoalan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di sektor kuliner, juga parkir hingga jasa layanan lainnya.

"Sebetulnya sudah lama tidak terdengar ada pedagang kuliner yang nuthuk wisatawan. Namun kali ini muncul lagi dan malah viral di media sosial. Kita kecolongan," ujar Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto kepada KR, Rabu (2/6) menanggapi pertanyaan terkait antisipasi munculnya kembali praktik nuthuk harga pada wisatawan.

Dikemukakan Danang, perlu langkah konkret agar praktik nuthuk tidak terulang kembali di masa mendatang. Langkah itu diikuti dengan pengawasan dan sanksi tegas, baik dari pemerintah maupun dari lingkungannya, atau kelompoknya. "Karena tindakan nuthuk membawa dampak kurang baik bagi nama Yogyakarta sebagai daerah kunjungan wisata terkemuka. Apalagi saat ini, di masa pandemi, Yogyakarta membutuhkan datangnya wisatawan.

Ironisnya, ketika sedang masa prihatin dan ingin membangkitkan kembali pariwisata muncul informasi yang viral di medsos tersebut. Apalagi saat ini muncul juga tarikan parkir yang tinggi di kawasan Malioboro.

Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang ditemui usai rapat paripurna di DPRD DIY, mengatakan jika semuanya semestinya tidak seperti itu. Walaupun sekarang menjadi masalah, kedepan pihaknya berharap tidak akan terulang dan harus ada kepastian harga.

"Takon Kotamadya, ojo takon aku (Tanya Pemerintah Kota, jangan saya, red). Jadi kalau saya semestinya tidak seperti itu. Harusnya ada kepastian. Sesuai ketentuan, kalau yang di Malioboro daftar makanan semua sudah ada. Diperlihatkan saja," katanya.

Ditambahkan Sultan, Pemkab kabupaten/kota harus bertanggung jawab dengan permasalahan ini. Tidak semuanya harus dilimpahkan ke Pemda. Ya mestinya itu semua orang mau beli itu, barangnya apa, harganya berapa. Harus ada. Kalau tidak, dimanapun akan menjadi masalah.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, memang pemerintah setempat mewajibkan penjual melampirkan daftar makanan dan harga. Dengan begitu, ada kemudahan, mau bicara soal retribusinya.

"Nanti retribusinya tidak jelas, harganya juga tidak jelas. Pekerjaan seperti itu paling mudah untuk dikorupsi. Kan itu masalahnya," jelasnya.

Selain itu Malioboro juga ada masalah, lalu lintas kendaraan. Untuk itu pihaknya menawarkan opsi untuk menjadikan sekitar Malioboro menjadi kawasan premium. Terutama persoalan parkir.

* Bersambung hal 7 kol 5

Yogya Sambungan hal 1

"Ya sudah, dekat Malioboro nyatakan saja premium. Parkir ning Malioboro, larang. Makin jauh parkirnya dari Malioboro, mu-rah. Tapi keputusan itu harus ada dan jelas agar tidak disalahgunakan. Itu saja," ungkapnya. (Awh/Jon)-f

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005